

ANALISIS POTENSI KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN  
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA LATIMOJONG  
KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

**SKRIPSI**



IBRAHIM MASDIN

10595 004 3213

PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN  
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA LATIMOJONG  
KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**

**IBRAHIM MASDIN  
105 9500 432 13**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Kehutanan**

**Strata Satu (S-1)**

**Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Identifikasi Potensi Konflik Penggunaan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Nama : Ibrahim Masdin

Stambuk : 105 950 043 213

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Makassar, 16 Oktober 2018

**Disetujui,**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hikmah, S.Hut, M.Si

  
Dr. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P

**Diketahui,**

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi

  
H. Burhanuddin, S.Pi., M.P.  
NBM. 853947

  
Dr. Hikmah, S.Hut, M.Si  
NBM. 1063 488

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Identifikasi Potensi Konflik Penggunaan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Nama : Ibrahim Masdin

Stambuk : 105 950 043 213

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

### SUSUNAN TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si  
Pembimbing I

(.....)

Dr. Ir. Hasanuddin, S.Hut., M.P., IPM  
Pembimbing II

(.....)

Husnah Latifah, S.Hut., M.Si  
Penguji I

(.....)

Ir. Muh. Daud, S.Hut., M.Si, IPM  
Penguji II

(.....)

Tanggal lulus : 16 Oktober 2018

## **PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

**IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN  
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA LATIMOJONG  
KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG.**

Adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Makassar, Oktober 2018

**IBRAHIM MASDIN**  
105 9500 432 13

**@ Hak Cipta milik Unismuh Makassar, Tahun 2018**

**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

1. *Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber*
  - a. *Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah*
  - b. *Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unismuh Makassar*
2. *Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk laporan apapun tanpa izin Unismuh Makassar*

## ABSTRAK

IBRAHIM MASDIN 105950043213 Identifikasi Potensi Konflik Penggunaan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang). Di bimbing oleh **Hikmah DAN Hasanuddin Molo**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan bagaimana bentuk-bentuk potensi konflik yang terjadi pada masyarakat dengan penggunaan lahan pada kawasan Hutan Lindung di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini bertempat di Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Latimojong di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, dengan melakukan wawancara langsung dengan 68 responden dari total 558 KK yang mempunyai lahan dalam kawasan hutan lindung, Penelitian dilakukan selama dua bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan Hutan Lindung Pegunungan Latimojong berupa kebun dan sawah, bentuk bentuk konflik yang berkembang yaitu masyarakat berkebun dalam kawasan htan lindung, Masyarakat membuat surat PBB (Pajak Bumi Bangunan) lahan yang menurut mereka warisan nenek moyangnya, masyarakat menerbitkan surat tanah dalam kawasan hutan lindung. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya konflik adalah dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai hutan lindung, dan mendorong pemerintah melakukan sosialisai mengenai pembentukan perhutanan sosial berupa HTR,HKM atau melakukan pembentukan perhutanan desa dengan tetap memperhatikan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hutan Lindung, HTR, HKM, Perhutanan Desa

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia yang tak terhingga dan akal pikiran yang sempurna dalam menyikapi berbagai hal khususnya dalam masa penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, junjungan kita semua yang telah membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi namun dengan keteguhan niat besar dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada mereka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Burhanuddin, S.Pi.,M .P selaku dekan Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Hikmah, S. Hut., M.Si. Selaku Ketua Prodi Kehutanan dan Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan didikan yang sangat berarti bagi penulis .
3. Ibunda Husnah Latifah,Shut.,M.Si Selaku penguji I dan Bapak Ir. Muhammad Daud, S.Hut.,M.P.,IP. Selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ir. Hasanuddin, S. Hut., M., Si Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf tata usaha Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Terima kasih kepada Warga Desa Latimojong beserta staf dan seluruh masyarakatnya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Kepada Sodarrah Rezky sealaku saudara angkat saya, Khuzaifah Boni, Cakka, Fadel Asman Saputra, Asriadi dan seluruh anggota PALM. yang telah banyak membantu dan memberikan saran serta masukan dalam kelancaran penelitian.
8. Terima Kasih kepada Putry dan keluarganya tercinta, yang memberikan Motivasi penyemangat serta dukungan dalam Penulisan skripsi ini.
9. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Kakek dan Nenek Tersayang serta Kaka dan adikku, Assiddik Masdin dan Namira Masdin, yang senantiasa memberi dorongan, semangat dan Do,anya kepada penulis.
10. Yang terpenting dan teristimewa kepada Ibunda Suhati. dan Ayahanda Masdin S.Pd. Dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau, sembah sujud penulis bagi ibunda dan Do,a ku untuk ayahanda tak terputus. Atas semua do,a, dorongan semangat, serta bantuan moril maupun materialnya selama penulis menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin penulis perbuat, baik sengaja maupun dikala lupa, dalam penyajian tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritikan yang membangun penulis harapkan.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Oktober 2018

Ibrahim Masdin

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI .....	iv
HAK CIPTA .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Hutan dan Pengelolaan Hutan.....	5
2.2. Hutan Lindung .....	5
2.3. Kawasan Hutan .....	7
2.4. Karakteristik Masyarakat Desa Sekitar Hutan .....	9
2.5. Masyarakat Sekitar Hutan.....	11
2.6. Interaksi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Dengan Sumberdaya Hutan.....	12
2.7. Konflik .....	13
2.8. Tenurial Lahan .....	16
2.9. Resolusi Konflik .....	19
2.10. Kerangka Fikir .....	21

III. METODE PENELITIAN.....	11
3.1. Waktu dan Tempat.....	23
3.2. Metode Penelitian .....	23
3.3. Objek Penelitian dan Alat Penelitian .....	23
3.4. Teknik Penentuan Sampel .....	24
3.5. Jenis Data.....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7. Analisis Data.....	26
3.8. Defenisi Oprasional .....	27
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	
4.1. Gambaran Umum Desa Latimojong.....	29
4.2. Keadaan Sosial da Ekonomi .....	30
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
5.1. Karasteristik Respdn .....	35
5.1.1. Umur .....	35
5.1.2. Tingkat Pendidikan .....	36
5.1.3. Jenis Pekerjaan Responden.....	38
5.1.4. Pendapatan Responden .....	39
5.1.5. Luas Lahan Garapan Responden .....	41
5.1.6. Asal Penduduk .....	41
5.2. Kondisi Hutan Desa Latimojong .....	42
5.3. Pola Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat Dalam Kawasan Huntan Lindung Desa Latimojong .....	44
5.3.1. Sawah.....	45
5.3.2. Kebun.....	45
5.3.3. Status KepemilikanLahan .....	46
5.4. Pemahaman Masyarakat Tentang Hutan Lindung.....	47
5.5. Potensi-Potensi Konflik Yang Berkembang.....	49
VI. PENUTUP .....	52

6.1. Kesimpulan .....	52
6.2. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Tabel	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian .....	21
2.	Kondisi Hutan Lindung di Desa Latimojong .....	43
3.	Wawancara Pada Responden .....	61
4.	Lahan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Hutan Lindung .....	63
5.	Perambahan Hutan Yang dilakukan oleh Masyarakat .....	64
6.	Kayu yang ditebang oleh Masyarakat .....	65

## **DAFTAR TABEL**

Gambar	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Metode Analisis Matriks Potensi Konflik.....	27
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelaminnya .....	31
3.	Potensi Pertanian di Desa Latimojong.....	32
4.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Latimojong .....	32
5.	Keadaan Sarana dan Prasarana .....	34
6.	Sebaran Umur Responden.....	36
7.	Tingkat Pendidikan Responden .....	37
8.	Jenis Pekerjaan Responden .....	39
9.	Pendapatan Rata-Rata Responden .....	40
10.	Luas Lahan Garapan Respoden .....	41
11.	Asal Penduduk Responden .....	42
12.	Bentuk Bentuk Potensi Konflik yang berkembang di Masyarakat .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar	<i>Teks</i>	Halaman
	1. Daftar kuosioner Penelitian.....	57
	2. Foto-Foto Kegiatan Penelitian .....	61

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai manfaatnya karena di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan rekreasi.

Hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional. Sejak jaman dahulu, mereka tidak hanya melihat hutan sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan sebagian masyarakat tradisional yang meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual, yakni dimana hutan atau komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya sebagai obyek yang memiliki kekuatan dan/atau pesan supranatural yang mereka patuhi (Fauzi, 2012).

Masyarakat lokal adalah elemen penting dalam pengelolaan hutan lestari, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang dimiliki, mereka telah hidup sebagai konservasionis sejati. Pola pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan yang ideal harus mampu didukung oleh kesadaran untuk menjaga, serta mengoptimalkan setiap elemen yang terlibat di dalamnya. Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan dilibatkan secara aktif dalam mengontrol kinerja pemerintah. Strategi *bottom up* yang mengakomodir peran serta masyarakat perlu diaplikasikan dalam konteks pengelolaan hutan lestari (Golar, 2014). Secara konseptual, masyarakat

yang berdomisili di sekitar hutan sangat tahu akan fungsi hutan itu sendiri, karena dapat merasakan secara langsung peran dan fungsinya. Aktifitas pertanian dan perkebunan yang dilakukan disisi lain memberikan tingkat kerawanan terhadap kerusakan hutan, sebab area kebun warga sekitar hutan dapat menjangkau wilayah hutan. Desakan kebutuhan hidup membuat warga

Pemanfaatan hutan dan perlindungan telah di atur dalam UUD 45, UU No. 5 tahun 1990, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan, namun gangguan terhadap sumberdaya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya makin meeningkat. Kerusakan hutan tahun 2012 di Indonesia mencapai 300 ribu ha per tahun. Sedang kurun waktu 2006-2010 kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta ha per tahunnya.

Penurunan kondisi sumberdaya alam ini terutama karena terjadinya kerusakan hutan. Kerusakan hutan yang meliputi kebakaran hutan, penebangan liar dan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah serta perubahan iklim mikro maupun global. Dimana kerusakan hutan disebabkan oleh adanya pengembalaan liar.

Beberapa penelitian mengenai konflik penggunaan lahan pada kawasan hutan, salah satu diantaranya adalah hasil penelitian oleh Mustafa (2005), tentang identifikasi Penyebab konflik .Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 konflik di sektor kehutanan cenderung meningkat cukup tajam. Jumlah konflik meningkat

hampir empat kali lipat pada tahun 1999 dibandingkan dengan tahun 1997. Pada tahun 2000 jumlah konflik melonjak drastis sampai 153 kejadian. Angka ini mengalami penurunan kembali pada tahun 2001 dan 2002. Namun berdasarkan data sampai dengan bulan Juni 2003, jumlah konflik cenderung meningkat kembali.

Faktor penyebab konflik yang paling sering terjadi di berbagai kawasan (36%) adalah ketidakjelasan tata batas hutan bagi masyarakat di sekitarnya., Aktifitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rusaknya ekosistem hutan dan menurunnya potensi keanekaragaman hayati. Sumberdaya hutan di Desa Latimojong telah dieksploitasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari seperti pembukaan lahan perkebunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Potensi konflik Penggunaan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan yang digunakan oleh masyarakat di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang
2. Bagaimana bentuk potensi konflik yang terjadi pada masyarakat dengan penggunaan lahan pada kawasan hutan lindung

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk pemanfaatan lahan yang digunakan masyarakat di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
2. Bagaimana bentuk potensi konflik yang terjadi pada masyarakat dengan penggunaan lahan pada kawasan hutan lindung Di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi setempat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dengan penerapan konsep hutan lestari dengan penataan areal dan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat sekitar
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Hutan dan Pengelolaan Hutan**

Undang-undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Departemen Kehutanan, 1999).

Menurut Deur dkk (1970) dalam Simon (1993) mengemukakan bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang pengelolannya harus diselarakan dengan karakteristik hutan itu sendiri. Peran manusia dalam pengelolaan hutan itu adalah sebagai produsen dan pembina, tidak hanya sebagai konsumen. Sebagai campur tangan manusia diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berkesinambungan.

Pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan nilai yang sebesar-besarnya dari jutaan selanjutnya dikatakan bahwa tujuan utama pengelolaan hutan harus ditentukan oleh sifat pemilikan dan itu ekonomi secara umum di wilayah hutan yang bersangkutan ( David, 1966 dalam Yarlin 2007)

### **2.2. Hutan Lindung**

Hutan lindung menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan lindung adalah kawasan-kawasan resapan air yang memiliki curah hujan tinggi dengan struktur tanah yang mudah meresapkan air dan kondisi geomorfologinya mampu meresap air hujan sebesar-besarnya. Hutan yang berfungsi sebagai pelindung merupakan kawasan yang keberadaannya diperuntukkan sebagai pelindung kawasan air, pencegah banjir, pencegah erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah yang berbeda untuk pengertian konservasi. Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu mempunyai fungsi perlindungan, sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Arief, 2001).

Berdasarkan Master Plan Kehutanan (1975 dalam Manan, 1976) hutan lindung dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Hutan lindung mutlak, yaitu hutan lindung karena keadaan alamnya sama sekali tidak dapat atau tidak diperbolehkan melakukan pemungutan berupa kayu, tetapi hasil hutan nir kayu boleh dipungut.
2. Hutan lindung terbatas, yaitu hutan lindung karena keadaan alamnya dapat atau diperbolehkan diadakan pemungutan hasil berupa kayu secara terbatas tanpa mengurangi fungsi lindungnya.

Pengelolaan hutan lindung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Pengelolaan hutan lindung dimaksudkan meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung, rehabilitasi dan reklamasi hutan lindung dan perlindungan hutan dan konservasi

alam di hutan lindung. Pentingnya dilakukan pengelolaan kawasan lindung karena upaya pengelolaan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa
- b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

### **2.3. Kawasan Hutan**

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadannya sebagai hutan tetap, sedangkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana manfaat hutan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem konsep alam yang menyediakan aliran “barang” dan “jasa” yang sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Jasa lingkungan ini dihasilkan oleh proses yang terjadi pada ekosistem alam. Contohnya, hutan sebagai ekosistem alam menyediakan berbagai produk kayu dan non kayu. Selain itu, hutan merupakan reservoir besar yang dapat menampung air hujan dan menyaring air tersebut, yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi manusia (Sulandari, 2005).

James (1991) dalam Widiarso (2005) membuat klasifikasi nilai manfaat didasarkan atas sumber atau proses manfaat tersebut diperoleh, yaitu :

1. Nilai guna (*use value*), yaitu seluruh nilai manfaat yang diperoleh dari penggunaan sumberdaya hutan seperti kayu bulat untuk keperluan industri pengolahan kayu, kayu bakar (energi), produksi tanaman pangan seperti perladangan, kebun, produksi ikan, produksi air untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan air rumah tangga dan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan ekowisata.
2. Nilai fungsi (*function value*), yaitu nilai manfaat yang diperoleh dari fungsi ekologis sumberdaya hutan seperti: pengendalian banjir, pencegahan intrusi air laut, dan habitat satwa.
3. Nilai atribut (*attributes value*), yaitu seluruh nilai yang diperoleh bukan dari penggunaan materi (hasil produksi barang dan jasa), tetapi aspek kebutuhan psikologis manusia yaitu menyangkut budaya masyarakat.

Dilihat dari aspek ekologis, kawasan hutan mampu berperan positif dalam mengendalikan erosi dan limpasan permukaan, memperbaiki kesuburan tanah dan keseimbangan tata air. Berdasarkan manfaat tersebut maka pembangunan kawasan hutan sering digunakan sebagai suatu program perlindungan kawasan dari masyarakat, perbaikan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya.

Kondisi hutan yang baik mengakibatkan terciptanya sumber-sumber manfaat yang berkelanjutan seperti sumber kayu dan sumber air (mata air) yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik yang berada di dalam hutan, sekitar kawasan hutan maupun masyarakat yang jauh dari kawasan hutan untuk mencukupi kebutuhan akan kayu dan air sehari-hari. Pengelolaan kawasan hutan yang baik

memberikan manfaat diantaranya menghidupkan kembali lahan-lahan kritis yang ada dan terbentuknya kembali lapisan humus yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Manfaat lain dari terjaganya kawasan hutan adalah terserapnya air hujan dengan baik sehingga mencegah terjadinya erosi permukaan tanah atau longsor (Suhendang 2002).

#### **2.4. Karakteristik Masyarakat Desa Sekitar Hutan**

Masyarakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan akar kata syarakayang berarti ikut serta atau berperan serta. Sedangkan dalam bahasa Inggris di sebut juga dengan society yang berasal dari bahasa latin Socius yang berarti kawan. Nugraha dan Nututujo (2005), mendefenisikan masyarakat sebagai suatu kehidupan ummat manusia yang berintraksi sesuai dengan sistem adat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terkait oleh satu rasa identitas bersama.

Menurut Betrand dalam Wisadirana (2004), masyarakat merupakan hasil dari suatu periode perubahan budaya dan akumulasi budaya. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar jumlah penduduk saja, melainkan sebagai suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antara mereka, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai cirri-ciri tersendiri. Dimana dari hubungan antara mereka ini terbentuk suatu kumpulan manusia yang kemudian menghasilkan suatu kebudayaan. Jadi masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Sekelompok orang yang mempunyai suatu kebudayaan yang sama atau setidaknya mempunyai sebuah kebudayaan bersama yang dapat dibedakan dari yang dipunyai oleh sekelompok lainnya dan yang

tinggal disatu daerah wilayah tertentu mempunyai perasaan akan adanya persatuan diantara anggotanya dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan yang berbeda dari lainnya.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.691/Kpts.II/1992, yang dimaksud masyarakat di dalam dan di sekitar hutan adalah kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami atau berada di dalam hutan maupun di pedesaan sekitar hutan (Ardiansyah, 2002). Admawidjaja (1991), menyatakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam melestarikan hutan selalu memperhatikan keberadaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan. Mereka memanfaatkan segala sumber penghidupan yang ada di dalam hutan untuk mempertahankan eksistensi kelompoknya yang masih terbelakang yang tidak pernah mengenal keadaan di luar batas wilayahnya. Dalam kondisi sosial ekonomi yang sederhana, mereka secara alamiah adalah penjaga dan pelestari alam lingkungannya. Masyarakat di sekitar dan di dalam hutan (*enclave*), tidak dirugikan oleh larangan mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebaliknya masyarakat dibina kesadarannya sebagai penjaga hutan konservasi dengan imbalan pada saat musim tertentu dapat menikmati hasil hutan seperti getah, rotan, buah-buahan, ranting-ranting kayu mati, dan berbagai jenis tumbuhan bawah. Diusahakan pemungutan hasil hutan terbatas di *enclave* dan zona penyangga dan areal yang telah ditunjuk.

Penduduk masyarakat dipinggir hutan dianggap memiliki fungsi sebagai tempat penyangga seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mereka. Dari hutan mereka memperoleh obat-obatan, buah-buahan, binatang buruan dan

kayu bakar. Di samping itu bagi penduduk desa tepian hutan, hutan adalah cadangan bagi mereka ketika desa mereka tidak mampu lagi menyediakan lahan pertanian apabila terjadi penambahan penduduk (Soetrisno, 1995).

## **2.5. Masyarakat Sekitar Hutan**

Masyarakat adalah kelompok atau himpunan orang-orang yang hidup bersama dan terjalin satu sama lainnya sehingga menghasilkan kebudayaan. Sedangkan pengertian dari desa merupakan himpunan penduduk yang cenderung homogen dengan sifat kegotongroyongan dan kekeluargaan yang tinggi serta bermata pencaharian utama dari sektor pertanian.

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal disekitar hutan baik yang memanfaatkan hasil hutan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Banyak sekali masyarakat Indonesia meskipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti tinggal didalam atau dipinggir hutan yang hidupnya bergantung pada hutan. Pada pertengahan tahun 2000 Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa 30 juta penduduk secara langsung mengandalkan hidupnya pada sektor kehutanan meskipun tingkat ketergantungannya tidak didefenisikan. Sebagian besar masyarakat hutan hidup dengan berbagai strategi ekonomi tradisional yakni menggabungkan perladangan dan berburu, seperti kayu dan hasil hutan lainnya (Hardjasoemantri, 1985).

Masyarakat yang tinggal disekitar hutan sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan perilaku yang paling krusial dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan secara tidak bertanggung jawab

yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri.

Berdasarkan pasal 69 dan 70 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban ikut serta dalam menjaga hutan dari gangguan perusakan, berperan aktif dalam rehabilitasi, turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat yang terkait langsung dengan berbagai upaya dalam rangka penyelamatan maupun pemanfaatan hutan dan lahan sehingga lestari dan berkesinambungan.

## **2.6. Interaksi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Dengan Sumberdaya Hutan**

Masyarakat sebagai bagian dari makhluk hidup, memegang peranan yang menentukan terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Sebuah ekosistem mencakup komponen makhluk hidup (manusia, hewan, jasad renik, tumbuh-tumbuhan) dan lingkungan yang tidak hidup (udara, energi, matahari, cahaya, air, tanah, angin, mineral dan lain sebagainya) yang keduanya saling berinteraksi dan saling berhubungan (Manan, 1998).

Masyarakat sekitar hutan, sebagaimana juga masyarakat pedesaan pada umumnya adalah masyarakat agraris yang sangat bergantung pada alam lingkungannya, mata pencahariannya adalah petani. Tapi tidak semua kebutuhan hidup ini bisa atau dapat dipenuhi dari bekerja sebagai petani, bisa dilihat dari kondisi tanahnya dan kemampuan serta teknik bertani yang masih sederhana (Junianto, B. 2007). Keterkaitan atau interaksi antara masyarakat dengan hutan

telah berlangsung cukup lama karena hutan memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat.

Keberadaan hutan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja terutama dalam hal pembukaan lahan, penebangan kayu, pembersihan lahan, sehingga mendapat upah (pendapatan) yang lumayan. Selain itu, bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber-sumber dasar yang terdapat di hutan seperti kayu bakar dan hasil hutan lainnya akan memberikan nilai tambah terutama bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (Mangandar, 2000). Contoh konkrit interaksi sistem sosial masyarakat dengan hutan dapat dilihat dari ketergantungan masyarakat desa di dalam dan di sekitar hutan sumber-sumber bahan kehidupan dasar seperti air, kayu bakar, bahan makanan dari hutan. Pada saat populasi manusia belum padat, gambaran interaksi kedua sistem masih bisa diterima artinya berfungsi normal. Tetapi pada kondisi populasi manusia semakin padat, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar hutan hutan semakin bertambah, maka gambaran kedua sistem cenderung timpang artinya sumberdaya hutan tidak mampu lagi menyediakan aliran bahan energi dan material kepada sistem sosial. Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa ada perubahan sikap dari sistem sosial masyarakat, maka fungsi hutan sebagai pengatur lingkungan hidup

## **2.7. Konflik**

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus dimasyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Kondisi tersebut yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu komunikasi, struktural, dan variabel pribadi. Menurut Kreps, konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Berdasarkan fungsinya konflik dibagi menjadi 3 fungsi yaitu

a) Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya, konflik dibagi menjadi dua macam, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang terjadi bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan prestasi organisasi. Sedangkan konflik disfungsional berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang merusak atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi/ kelompok.

b) Berdasarkan pihak yang terlibat

James Stoner dan Edward Freeman (.....) menggolongkan konflik berdasarkan pihak-pihak yang terlibat didalam sebuah konflik. Pertama,

konflik dalam diri individu. Konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan, atau karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Kedua, konflik antar individu. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan individu yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Kelima, konflik antar organisasi. Keenam, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda.

c) Berdasarkan Struktur organisasi

Winardi (dalam bukunya berdnard limbong), membagi konflik berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi menjadi empat macam yaitu :

1. Konflik Vertikal yaitu konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi, misalnya antara atasan dan bawahan.
2. Konflik Horizontal yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya, konflik antara karyawan, atau antar departemen yang setingkat.
3. Konflik garis-staf, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando, dengan pejabat yang biasanya berfungsi sebagai penasihat dalam organisasi.
4. Konflik peran, yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan.

## 2.8. Tenurial Lahan

Secara harfiah istilah tenurial berasal dari kata, dalam bahasa Latin yang mencakup arti: memelihara, memegang dan memiliki. Berarti sesuatu yang dipegang, dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban pemangku lahan ( = pemangkuan atau penguasaan). adalah istilah untuk hak pemangkuan lahan, bukan hanya sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang mungkin memangku lahan ( dan sumber-sumber alam lainnya ), tetapi ia tidak selalu mempunyai hak untuk menguasai (dan sumber-sumber alam lainnya). Teori tenurial digambarkan sebagai yaitu sekumpulan hak atas tanah yang di sederhanakan sebagai berikut (FAO,2010):

1. Hak pakai yaitu hak untuk menggunakan lahan (penggembalaan, menanam tanaman subsisten, mengumpulkan produk-produk kehutanan: kayubakar, madudanlain-lain).
2. Hak untuk mengontrol yaitu hak untuk membuat keputusan bagaimana lahan harus digunakan, termasuk memutuskan apa yang harus ditanam dan untuk mengambil keuntungan finansial dari penjualan tanaman.
3. Hak mentransfer yaitu hak untuk menjual atau menggadaikan tanah, hak untuk menyampaikan kepada orang lain melalui intra-komunitas realokasi, untuk mengirimkan tanah kepada ahli waris melalui warisan dan realokasi hak guna dan kontrol.

Lebih lanjut Galludra (2010) mendefinisikan sebagai sistem tentang hak-hak dan kelembagaan yang menata, mengatur dan mengelola akses dan penggunaan

lahan. Penguasaan lahan (dan sumber-sumber alam lainnya) sering dikategorikan sebagai berikut (FAO,2011):

- a) Individu: hak kepada pihak swasta yang mungkin individu, sekelompok orang, atau badan hukum seperti organisasi badan atau non-keuntungan komersial. Sebagai contoh, dalam masyarakat, keluarga individual dapat memiliki hak eksklusif untuk paket perumahan, pertanian dan pohon-pohon tertentu; kecuali masyarakat adat yang memiliki lahan tidak perlu persetujuan pemegang hak dalam memanfaatkan sumber daya lahannya
- b) Komunal: hak untuk bersama, mungkin ada dalam komunitas di mana setiap anggota memiliki hak untuk menggunakan secara independen kepemilikan masyarakat. Sebagai contoh, anggota masyarakat mungkin memiliki hak untuk merumput ternak di padang rumput umum.
- c) Akses terbuka: hak-hak tertentu yang tidak ditugaskan untuk siapapun dan tidak ada yang dapat dikecualikan. Hal ini biasanya meliputi penguasaan laut di mana akses ke laut tinggi umumnya terbuka untuk siapa saja, contoh lainnya adalah padang penggembalaan dan hutan ( ).
- d) Negara: hak yang diberikan untuk kepentingan publik. Sebagai contoh, di beberapa negara, lahan hutan dapat jatuh dibawah mandat negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desentralisasi pemerintahan

Ketidak pastian dalam penguasaan kawasan hutan dapat menghambat efektivitas pengelolaan hutan. Permasalahan ini dapat menimpa masyarakat lokal yang bermukim dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan, termasuk pihak swasta dan pemerintah. Tumpang-tindih hak atas kawasan hutan terjadi akibat

sistem perijinan yang kurang terpaduan penguraian persoalan atas klaim lahan yang kurang memadai. Dalam konteks konflik tenurial (penguasaan atas lahan dan sumber daya alam) didalam kawasan hutan, rentang jarak yang jauh antara aspek *de jure* dan patut mendapatkan pencermatan yang mendalam oleh berbagai pihak.

Di satu sisi sistem penguasaan yang diatur oleh hukum negara sangat lemah dalam operasionalnya, sementara sistem yang diatur secara tradisional (adat) tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang mendapat dukungan secara hukum. Hal ini mempengaruhi kepastian hak atas lahan tersebut. Konflik penguasaan tanah muncul dari persepsi dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki antar pihak terhadap hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan (Safitri ,2011). Konflik dalam kawasan hutan biasanya terjadi akibat tidak jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan sistem tenurial. Hal ini dapat terjadi antara perorangan, masyarakat, badan/ instansi pemerintah atau sektor swasta. Batas-batas kawasan hutan yang belum disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah juga memicu terjadinya konflik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lahan di kawasan hutan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau penduduk sekitar, baik pendatang maupun penduduk lokal namun keberadaan masyarakat tersebut belum diakomodir terutama dalam perencanaan pembangunan kehutanan.

Dalam keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan disebutkan bahwa masalah pertanahan meliputi masalah teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Dalam keputusan

tersebut, disebutkan pula bahwa permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dipusat maupun daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.

Sedangkan peraturan kepala BPN RI nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan memberikan batasan mengenai apa itu kasus pertanahan. Pasal 1 angka 1 perka BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perpu dan kebijakan pertanahan Nasional.

## **2.9. Resolusi Konflik**

Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai (Soetomo, 1995: 33). Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008 : 153) terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik (Soerjono Soekanto, 1990: 77-78), yaitu:

1) *Coercion (Paksaan)*

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Coercion merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

2) *Compromise*

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

3) *Arbitration*

Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat.

4) *Mediation (Penengahan)*

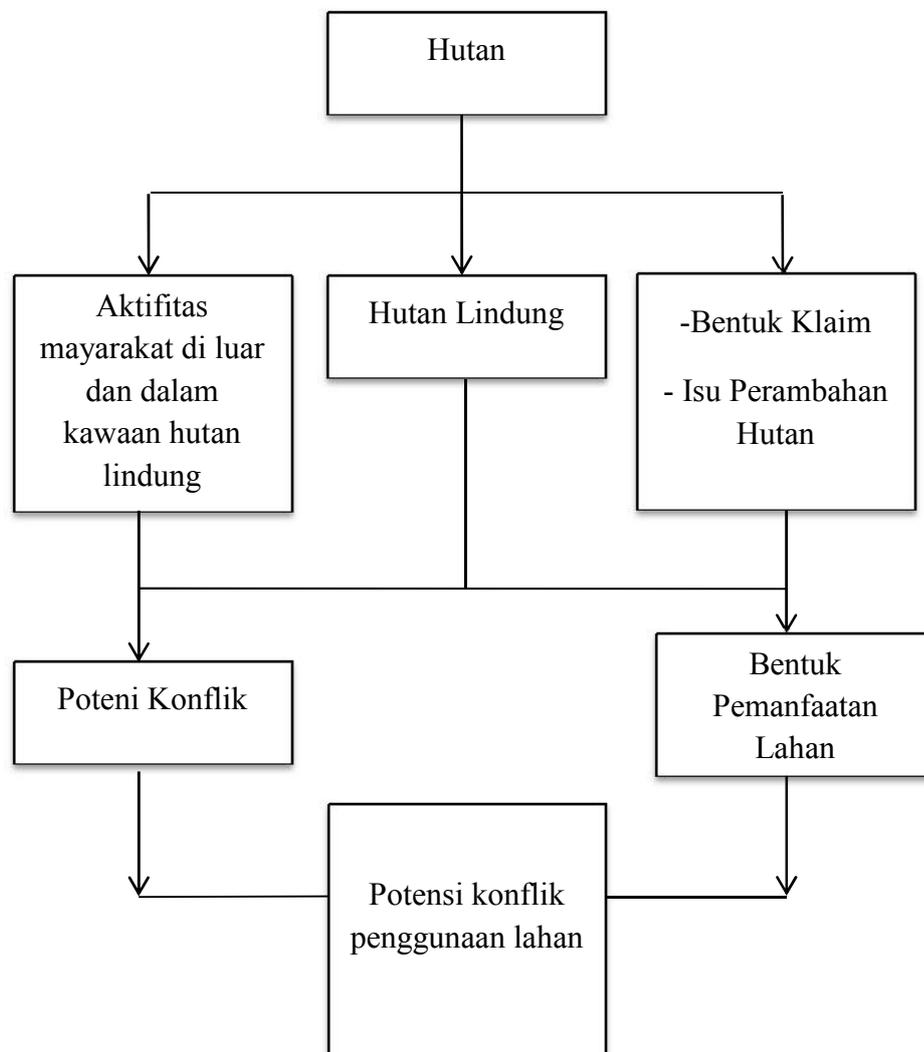
Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

5) *Conciliation*

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

## 2.10. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pada kerangka teoriti, melalui penelitian ini akan diungkapkan yang terjadi di masyarakat yang berada pada sekitaran kawassan hutan lindung Gunung Latimojong. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir penelitia ini dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Pada kerangka pikir di atas dijelaskan bahwa status hutan di Desa Latimojong adalah hutan lindung jika dilihat pada kondisi wilayah dan tujuan mempunyai pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Namun hutan lindung Gunung Latimojong mendapat gangguan dari berbagai masyarakat karena aktifitas masyarakat masih bergantung pada area kawasan hutan lindung Gunung Latimojong. Kondisi masyarakat saat ini banyak melakukan aktifitas pemanfaatan hasil hutan baik berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan itu tidak hanya sampai disitu karna banyak masyarakat yang mencoba memperluas lahan secara ilegal contohnya: perambahan besar-besaran dan perladangan di sekitaran kawasan hutan. Adanya klaim kawasan dan isu perambahan oleh masyarakat sehingga perlu dilakukan identifikasi konflik penggunaan lahan untuk dapat mengatasi dan memasukkan solusi pemecahan konflik yang terjadi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana penelitian awal dimulai dari bulan Juli-Agustus 2018.

#### **3.2. Objek dan Alat Penelitian**

##### 1. Objek Penelitian

Objek di penelitian ini adalah Masyarakat Lokal Desa Latimojong yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

##### 2. Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Daftar pertanyaan ( Kuisisioner ).
- b. Alat tulis untuk mencatat setiap informasi responden.
- c. Buku tally sheet, digunakan untuk rekapitulasi hasil data responden.
- d. Kamera (foto), untuk dokumentasi.

#### **3.3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Martini (1996:73). Penelitian deskriptif Kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Disini peneliti ingin menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Potensi Konflik Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang .

#### **3.4. Teknik Penentuan Responden**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 68 KK dari total 558 KK di Desa Latimojong. Pertimbangan dalam penentuan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan yaitu pengambilan responden yang jaraknya paling dekat atau berbatasan langsung dengan hutan, berstatus kepala keluarga dan memiliki lahan di dalam kawasan hutan lindung.

Selain menggunakan pedoman wawancara, untuk meningkatkan keragaman data, maka informan yang akan dipilih dibatasi dengan kriteria:

- a) Informan adalah warga lokal Desa Latimojong.
- b) Informan memiliki lahan di dalam hutan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), yang diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam sehingga dapat menunjang validasi data yang diperoleh dari hasil kuisioner.

### **3.5. Jenis Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder

#### **a. Data Primer**

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara terhadap masyarakat (responden) berdasarkan pedoman yang telah disiapkan (kuisisioner). Data ini meliputi informasi, tingkat pendidikan, umur, luas lahan, asal penduduk, jumlah tanggungan jenis pendapatan dan pengeluaran sebagai faktor perilaku masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan.

Data ini juga meliputi sejarah penggunaan lahan, jenis penggunaan lahan yang di klaim oleh masyarakat sebagai lahan pemukiman, persawahan, kebun, dan lain lain, status masyarakat apakah penduduk asli atau pendatang dari daerah lain, peran masyarakat terhadap lahan apakah penggarap atau pemilik lahan.

#### **b. Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder yang diambil adalah data yang diperlukan sebagai penunjang dalam penelitian ini, yaitu keadaan umum lokasi yang meliputi: keadaan fisik lokasi penelitian serta data penunjang yang diperoleh dari sumber yang terkait yakni instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian yaitu data sosial ekonomi masyarakat serta beberapa literatur.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik wawancara (kuisisioner) data dikumpulkan dengan mewawancarai masyarakat desa di sekitar kawasan hutan sebagai responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner berisikan pilihan ataupun isian atas jawaban dari pertanyaan. Dalam hal ini, juga dilakukan wawancara bebas yang dilakukan tanpa kuisisioner mengenai hal-hal yang masih berhubungan dengan penelitian, seperti sumber-sumber mata air dan sungai yang mengalir ke perkampungan mereka, serta ketersediaan dari sumber-sumber air tersebut (lamanya air mengalir).
2. Pengumpulan Data Pendukung digunakan untuk membantu penelitian dengan pengutipan dan pencatatan data dari dinas atau instansi terkait, seperti kantor Kecamatan, dan kantor Dinas Kehutanan.
3. Studi pustaka, yaitu mencatat dan mempelajari studi yang telah dilakukan dan berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.7. Analisis Data**

Data tentang bentuk-bentuk pemanfaatan dilakukan dengan analisis identifikasi dan klasifikasi bentuk bentuk pemanfaatan. Untuk mengetahui potensi konflik yang muncul maka data potensi konflik dianalisis melalui metode matriks kemudian di lanjutkan dengan analisis kualitatif deskriptif. Secara rinci metode matriks dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Metode Analisis Matriks Potensi Konflik

No	Jenis Kegiatan	Dampak		Harapan dan Keinginan		Solusi

### 3.8. Defenisi Operasional

Batasan-batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa istilah :

1. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
2. Potensi konflik adalah suatu hal yang dapat memicu timbulnya konflik antara masyarakat sekitar kawasan hutan.
3. Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

4. Masyarakat adalah masyarakat yang mempunyai lahan perkebunan atau yang memanfaatkan daerah kawasan hutan
5. Respon adalah pendapat, tanggapan, pandangan dan penerimaan responden terhadap pengelolaan Kawasan Hutan Di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
6. Pola pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan.
7. Sejarah kepemilikan lahan adalah kepemilikan lahan yang di buktikan dengan bukti tertulis oleh masyarakat Desa Latimojong.
8. Responden adalah masyarakat Lokal Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang berada pada kawasan hutan.

## **IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1. Gambaran Umum Desa Latimojong**

#### **4.1.1 Sejarah Singkat Desa**

Pada tahun 1996 Desa Latimojong terbentuk dimana didalam desa tersebut terdapat Dusun Karang, Dusun Angin-angin, Dusun Rantelemo, dan Dusun Karuaja.

Desa Latimojong dulunya merupakan salah satu Desa di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Kemudian pada tahun 2011 Desa tersebut di ambil alih oleh Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang yang melakukan pemekaran. Desa Latimojong berbatasan langsung dengan pegunungan latimojong yang sudah di tetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan lindung

#### **4.1.2. Letak dan Luas**

Desa Latimojong merupakan Desa yang berada di Kecamatan BuntuBatu Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayahnya sekitar 19,98 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2140 jiwa, jarak dari ibu kota kecamatan 14 Km Kabupaten 57 Km dapat di tempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Secara administrasi Desa Latimojong berbatasan dengan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Eran Batu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ledan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Potokkullin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buntu Mondong

### **4.1.3. Kondisi Geografis**

Desa Latimojong adalah salah satu daerah atau wilayah di Kecamatan Buntu Batu yang memiliki karakteristik topografi sebagai daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh bukit dan pegunungan dengan ketinggian  $\geq 1.000$  Mdpl. Dengan suhu udara 20-25 °C . Dengan curah hujan 5000 mm pertahun dan memiliki tofografi yang bergelombang memanjang dari Barat ke Timur dengan kelerengan 45°.

## **4.2. Keadaan sosial dan Ekonomi**

### **4.2.1. Penduduk**

Penduduk merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya sebuah negara atau wilayah sekaligus aset atau modal bagi suksesnya pembangunan disegala bidang kehidupan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Oleh karena itu kehadiran penduduk dan peranannya sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah, baik dalam skala yang kecil maupun skala yang besar, sehingga dibutuhkan data atau potensi kependudukan yang tertib dan terukur.

Jumlah penduduk di Desa Latimojong yaitu berjumlah 2.140 jiwa yang terdiri dari Laki-Laki 1.110 dan perempuan 1.030 jiwa dengan jumlah 558 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 2

Tabel 2. Jumlah penduduk dirinci berdasarkan jenis kelamin masyarakat Desa Latimojong kecamatan Buntu Batu, Kabupaten enrekang

No	Wilayah (Dusun)	Laki-Laki	Perempuan	Kepala Keluarga
1	Rante Lemo	440	415	220
2	Karuaja	153	130	67
3	Angin-Angin	253	310	165
4	Karangan	264	175	106
	Jumlah	1.110	1.030	558

*Sumber : Kantor Desa Latimojong 2017*

Tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk masing masing Wilayah/Dusun Desa Latimojong dapat kita ketahui dari banyaknya jumlah kepala keluarga yaitu Dusun Rante Lemo 220 KK, Dusun Karuaja 67 KK, Dusun Angin-Angin 165 KK, dan Dusun Karangany 106 KK.

#### **4.2.2. Mata Pencarian**

Sumber penghasilan masyarakat di Desa Latimojong sebagian besar berasal dari sektor pertanian, hal ini bisa dilihat dari daerahnya yang sangat cocok untuk tanaman pertanian sehingga sebagian besar masyarakat Desa Latimojong bekerja sebagai petani, baik sebagai petani penggarap maupun petani tanah milik. Dalam setiap keluarga ada 1-2 orang yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Mata pencarian penduduk terbagi beberapa bidang dan lapangan kerja antara lain, Pertanian, perkebunan, berternak, membuka warung, perbengkelan pedagang, sopir, buruh, karyawan swasta Guru/PNS dan TNI/POLRI.

Tabel 3. Potensi Pertanian Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang

NO	Potensi Pertanian	Luas Lahan (Ha)	Keterangan
1	Padi	15,5	-
2	Kopi	50,5	-
3	Coklat	5,5	-
4	Bawang	20,00	-
5	Cengkeh	35,5	-
6	Merica	10,5	-

Sumber : Profil Desa Latimojong 2017

#### 4.2.3. Pendidikan

Berdasarkan data sekunder yang di ambil dari lapangan, sebagian besar masyarakat Desa Latimojong memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, yakni sekolah Dasar (SD), hanya sedikit saja yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi bahkan banyak yang putus sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel . 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Tidak Tamat SD	125	-
2	SD	362	-
3	SMP	233	-
4	SMA	432	-
5	D2/D3/Sarjana	40	-

Sumber : Profil Desa Latimojong 2017

#### **4.2.4. Kondisi Sosial Masyarakat dan Agama**

Mayoritas penduduk Desa Latimojong adalah Suku Massenrempulu atau suku Duri. Bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu Bahasa Duri dan Bahasa Indonesia. Adat istiadatnya tradisional yang masih kental, kehidupan sosial masyarakat di daerah ini hidup secara berkelompok dengan jarak rumah yang berdekatan satu dengan yang lainnya dan dekat terhadap sumberdaya hutan.

Kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat sehari-hari masih menganut gotong royong seperti kerja bakti memperbaiki jalan, memperbaiki perairan dan kegiatan keagamaan serta kerja bakti yang rutin dilakukan mempererat silaturahmi antar masyarakat.

Mata pencarian utama masyarakat di Desa Latimojong berupa pertanian, dimana masyarakat tersebut memiliki sifat gotong royong yang tinggi dan jika ada masalah yang tak terselesaikan akan dilakukan musyawarah bersama warga di hadapan pemerintah setempat demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Desa Latimojong menganut 100% agama Islam. Kegiatan kegiatan yang sering dilakukan pada saat Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra' Mi'raj. Kegiatan tersebut biasa dilakukan di masjid-masjid ataupun musollah terdekat.

#### **4.2.5. Sarana dan Prasarana Umum**

Sarana perekonomian mencirikan kemajuan daerah secara fluktuatif dari waktu ke waktu, dilihat dari tingkat daya beli masyarakat, perputaran uang, makin banyaknya penyedia modal ( lembaga keuangan), Investor, jalan, dan sebagainya.

Sarana dan prasarana umum yang menunjang aksebilitas perekonomian Desa Latimong dapat kita lihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Keadaan Sarana dan Prasarana Umum Desa Latimojong

No	Jenis	Volume	Keterangan
1	Jalan Beton	-	-
2	Jembatan	4	-
3	Posyandu	2	-
4	Sekolah Dasar	3	-
5	Masjid	4	-
6	Balai Pertemuan	-	-
7	Kantor Desa	1	-
8	TK/TPA	2	-
9	Kantor pemerintahan	-	-
10	SMP Satap	1	-
11	Puskesmas/Pustu	1	-

*Sumber : Profil Desa Latimojong 2018*

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **5.1. Karakteristik Responden**

Karakteristik responden yang diteliti meliputi umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan rata-rata per bulan, dan luas lahan garapan responden. Karakteristik responden dapat mendeskripsikan keadaan sosial masyarakat, yaitu masyarakat di Desa Latimojong yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung.

#### **5.1.1. Umur**

Salah satu faktor sosial ekonomi yang menentukan kemampuan petani dalam berusaha adalah umur. Semakin tua umur petani, maka kemampuannya dalam berusaha tani semakin berkurang. Sebaiknya petani yang berumur muda dan sehat mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik dan dapat menerima inovasi-inovasi baru pada petani yang lebih tua.

Hasil penelitian menunjukkan variasi umur responden mulai dari umur termuda yaitu 27 tahun dan umur tertua 70 tahun. Hal ini dilihat pada pemilihan responden yang terpilih merupakan yang berstatus kepala keluarga dan mendiami daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dan mempunyai lahan dalam kawasan tersebut.

Umur seseorang biasanya menentukan kemampuannya dalam melakukan aktifitas serta kematangan dalam perbuatan (tindakan). Berikut disajikan sebaran umur responden masyarakat lokal di Desa Latimojong pada Tabel 6 .

Tabel 6. Sebaran Umur Responden di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang

No	Umur (Tahun)	Orang	Persentase (%)
1	20 – 30	11	16,18
2	31 – 40	25	36,76
3	41 – 50	22	32,35
4	51 Keatas	10	14,71
	<b>Jumlah</b>	68	100,00

*Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2018*

Berdasarkan Tabel .6 diperoleh sebaran umur tersebar merata di setiap kelompok masyarakat lokal yang menjadi responden. Sebagian besar atau 36,76% masyarakat berada pada umur 31 - 40 tahun. Pada usia 41 – 50 sebanyak 22 orang pada usia 20-30 tahun sebanyak 11 orang, sedangkan usia 50 tahun keatas hanya 10 orang.

Pada kondisi umur ini umumnya responden berada pada masa produktif dimana mereka bisa melakukan kegiatan bertani atau berladang dengan sangat semangat, artinya aktifitas mereka terhadap pemanfaatan kawasan hutan berupa lahan hutan, sumber kayu dan sumber air dikatakan bisa maksimal pada masa produktif.

### **5.1.2. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan pada responden masyarakat sekitar kawasan hutan diduga turut mempengaruhi pola pikir dalam bertindak terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Pemahaman serta penerimaan suatu objek sebagian di tentukan oleh tingkat pendidikan responden, baik yang sifatnya formal maupun

informal. Makin tinggi pendidikan responden makin banyak informasi-informasi yang dapat di terima dengan memila dari sudut pandang positifnya sehingga dapat di terima.

Berdasarkan tingkat pendidikann dilakukan pengelompokan jumlah responden seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Responden di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah (jiwa)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Tidak Tamat - Tamat SD	48	70,58
SMP – SMA	17	25,00
Diploma - Sarjana	3	4,42
<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2018*

Tabel 7. menunjukkan bahwa responden dengan kategori tidak tamat sampai dengan tamat SD paling banyak yaitu 48 orang (70,58 %) sedangkan yang tamat SMP sampai SMA sebanyak 17 orang (25,00 %), dan Diploma atau sarana hanya memiliki 3 orang (4,42 %). Dari hasil penelitian kurangnya responden yang tamat SD dikarenakan jarak yang di tempuh untuk bersekolah cukup jauh dan fasilitas yang kurang. Jarak yang jauh mengurangi minat masyarakat untuk bersekolah karna untuk menempuh lokasi ke sekolah harus memiliki biaya yang relatif besar untuk ongkos transportasi. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk mencari pekerjaan seperti berkebun dan tidak jarang masyarakat lebih memilih merantu ke luar daerah.

Jelas terlihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Latimojong cenderung rendah. Rendahnya pendidikan menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran yang cukup dalam upaya pelestarian hutan . Sianturi (2007) mengemukakan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi tingkat sikapnya dan demikian sebaliknya.

### **5.1.3. Jenis Pekerjaan Responden**

Salah satu parameter yang digunakan untuk melihat kehidupan ekonomi masyarakat adalah jenis pekerjaan. Pekerjaan bagi sebagian besar orang merupakan hak dan kewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Masyarakat di Desa Latimojong rata-rata berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi berprofesi sebagai buruh tani, penjual, dan lain-lain Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan masyarakat dengan lahan di kawasan hutan sangat tinggi. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap lahan hutan sangat nampak, sedikitnya jumlah penduduk yang bekerja dibidang non pertanian seperti sebagai buruh bangunan, pegawai negeri, wiraswasta dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya. Di bawah ini disajikan tabel jenis pekerjaan responden yang dibagi menjadi 5 kategori.

Tabel 8. Jenis pekerjaan Responden di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Petani	49	72,05
Penjual (di warung)/Pedagang	6	8,84
Buruh Tani	9	13,23
PNS	2	2,94
Pekerjaan Lainnya	2	2,94
<b>Jumlah</b>	68	100,00

*Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2018*

Berdasarkan Tabel 8. di atas bahwa masyarakat Desa Latimojong hanya mengandalkan dari sektor pertanian (sebagai petani). Responden dengan pekerjaan sebagai petani 49 orang (72,05 %), Penjual / Pedagang yaitu sebanyak 6 orang responden (8,84 %), Buruh Tani 9 orang (13,23 %) PNS dan pekerjaan lainnya masing masing 2 orang (2,94 %)

#### **5.1.4. Pendapatan Rata-Rata Responden**

Pendapatan rumah tangga petani dapat mencerminkan keadaan ekonomi rumah tangganya. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu indikator tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh masyarakat dalam berkebun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, ditambah dengan jumlah tanggungan keluarga yang cukup banyak. Walaupun sebagian kebutuhan hidup di kampung tidak dibeli, tentunya tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk

membesarkan 2-9 orang anak. Pendapatan responden dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Pendapatan Rata Rata Responden di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

<b>Tingkat pendapatan (Rp/Bulan)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< Rp.500.000	38	55,88
Rp.500.000 - Rp.1.000.000	19	27,95
≥Rp.1.000.000	11	16,17
Jumlah	68	100,00

*Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2018*

Pada penelitian ini, pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima responden selama satu bulan. Tingkat pendapatan dari responden diukur dengan 4 tingkatan yaitu di bawah Rp500.000,- sebanyak 38 orang (55,88%), sebanyak 19 orang (27,95%) berpendapatan Rp 500.000, sampai Rp 1.000.000, dan sebanyak 11 orang (16,17%) yang berpendapatan di atas Rp 1.000.000,.

Tingkat pendapatan masyarakat Desa Latimojong yang tidak menentu, dalam kesehariannya mengandalkan hidupnya dari hutan. Rendahnya tingkat pendapatan petani hutan, disebabkan mereka belum dapat memetik hasil dari tanaman pokok . Meskipun penghasilan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak menentu, mereka tetap bertahan hidup. Hal ini karena adanya jaminan sosial dari pihak keluarga serta tetangga dalam bentuk saling membantu, dan hidup bergotong-royong.

### 5.1.5. Luas Lahan Garapan Responden

Pada umumnya masyarakat Desa Latimojong mengelola lahan garapan sendiri baik dalam bentuk sawah, ladang maupun pekarangan ditotalkan serta di kelompokkan dalam 3 kategori yaitu 0,5 ha, 0,5-1 ha, dan  $\geq 1$  ha .

Berikut disajikan tabel luas lahan garapan (Ha) responden yang dibagi menjadi 3 kategori

Tabel 10. Luas Lahan Garapan Responden di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

<b>Luas Lahan (Ha)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
0,5	13	19,11
0,5 – 1	51	75,00
$\geq 1$	4	5,89
<b>Jumlah</b>	68	100,00

*Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2018*

Kepemilikan lahan di bawah 0,5 Ha sebanyak 13 orang (19,11%) pada, diikuti kisaran 0,5-1 ha sebanyak 51 orang (75%) terkecil lahan di atas  $\geq 1$  ha sebanyak 4 orang (5,89%) .

Hal ini menggambarkan bahwa umumnya responden memiliki lahan yang luas, penyebab luasnya lahan masyarakat karna mereka selalu merambah hutan, areaal hutan banyak digunakan sebagai kebun, banyaknya kebunn di sebabkan karna aktifitas utama masyarakat adalah petani.

### 5.1.6. Asal Penduduk

Asal penduduk digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang, penduduk asli yaitu asyarakat yang secara turun temurun

tinggal di daerah tersebut yang biasanya suku asli masyarakat tersebut. Sedangkan penduduk pendatang, yaitu masyarakat yang mendiami suatu lokasi daerah tertentu. Yang sifatnya menetap dan umumnya terdiri atas suku masyarakat bukan asli setempat atau datang dari luar daerah.

Tabel 11. Asal Penduduk Responden di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

<b>kategori</b>	<b>orang</b>	<b>persentase (%)</b>
Penduduk Asli	60	100
Penduduk Pendatang	0	0
<b>sjumlah</b>	68	100,00

*Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2018*

Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa seluruh responden adalah penduduk asli setempat yaitu 68 orang (100 %). Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Latimojong di dominasi oleh penduduk asli.

## **5.2. Kondisi Hutan di Desa Latimojong**

Kondisi hutan di Desa Latimojong saat ini kurang baik, hal ini disebabkan karena adanya penebangan liar dan pengalihan kawasan hutan menjadi perkebunan.

Hal ini dikatan seorang responden Muhlis (39 Tahun) yang bekerja sebagai petani

“ Alasan masyarakat dalam pemanfaatan hutan karena kebutuhan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja. Masyarakat memanfaatkan kondisi lingkungan yang subur untuk bercocok tanam tanpa memperhatikan dampak yang nantinya akan dihadapi oleh generasi yang akan datang, hal tersebut juga tidak lagi menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam mengelola hutan”.

(wawancara, 15 juli 2018)

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap tugas pengawasan terhadap kelestarian hutan di Desa Latimojong telah menjadi salah satu pemicu perilaku menebang pohon di hutan. Kegiatan penebangan kayu secara liar (illegal logging) telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Berdasarkan wawancara, dengan Responden Hattasa (40 Tahun)

“ Banyak memang yang menebang pohon di dalam kawasan hutan ada yang na jual ada juga yang nabikin jadi rumah sedikit sedikit ji dulu yang menebang pohon di kawasan di ambil ji jadi kayu bakar tapi dari 2012 mulaimi menebang pohon untuk najual”.

(wawancara, 26 juli 2018)



*Gambar 2. Kondisi Hutan Lindung di Desa Latimojong*

Wilayah pinggiran antara kawasan hutan dan pemukiman warga sudah gundul karena dimanfaatkan warga sebagai area perkebunan. Pohon-pohon besar di pinggiran hutan juga sudah ditebang dan mengakibatkan berkurangnya vegetasi di kawasan hutan. Selain mengurangi vegetasi di kawasan hutan dampak lain yang di rasakan olehwarga Desa Latimojong menimbulkan masalah lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan warga sekitar hutan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Latimojong syahrudin (54 Tahun)

“sampai saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menebang pohon. Karena di takutkan masyarakat nanti akan membakar hutan kalau sudah ditegur. Biasa ada pihak kehutanan dtang tapi saya melarang menegur warga karna taku ada hal hal yang tidak di inginkan”

(Wawancara 10 juli 2018)

Ini menandakan bahwa aparat pemerintah di level bawah yaitu kepala desa masih sulit melaksanakan kebijakan tersebut secara langsung. Dengan pertimbangan masyarakat yang belum memahami aturan selain itu juga karena berkaitan erat dengan mata pencaharian masyarakat.

### **5.3. Bentuk Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Latimojong**

Bentuk Pemanfaatan lahan yang di terapkan oleh Masyarakat di Desa Latimojong Masih bersifat tradisional dan Sederhana. Hal ini merupakan kebiasaan turun temurun bagi masyarakat yang ada. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bentuk bentuk pemanfaatan lahan yang terdapat di Desa Latimojong adalah hutan alam, sawah, perkebunan, (kebun campuran, kopi, cengkeh, dan tanaman semusim,) semak belukar, dan pemukiman.

Salah satu responden Saleh (45 Tahun) mengatakan

“Rata mata pencaharian mereka adalah bertani dan berkebun yang telah dilakukan secara turun temurun, jadi kalau di bilang ada aturan mereka dilarang menggarap hutan tentu mereka protes karena mereka mau cari nafkah dimana lagi”

(Wawancara, 5 juli 2018)

Mereka sangat menggantung hidup mereka pada pertanian , perkebunan dan hasil hutan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

### **5.3.1. Sawah**

Sawah yang dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut umumnya terletak di pinggir jalan. Dalam praktek pengelolaan tanah masyarakat tidak hanya menggunakan tenaga ternak sapi tetapi juga sudah menggunakan mesin traktor. Masyarakat mengelolah sawah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri yang sudah turuntemurun serta mengikuti perkembangan.

Berdasarkan wawancara dengan Haling ( 51) yang bekerja sebagai buruh tani

“ Sawah yang kami garap sejak dulu adalah warisan dari keluarga, saya tidak tau apakah sawah ini masuk dalam kawasan hutan atau tidak, saya hanya menggarapnya saja, karna masyarakat di sekitar hutan ini pendidikannya hanya tamatan Sekolah Dasar, sehingga masalah aturan – aturan yang ada kurang di anggap penting untuk mereka ketahui”

(Wawancara, 8 agustus 2018)

Masyarakat masih menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan. Mereka rata – rata menggarap sawah ini sesuai dengan apa yang penulis temukan di lapangan dimana masih banyak penduduk Desa Latimojong yang menetap di daerah pegunungan secara turun temurun. Mereka sangat menggantungkan hidup mereka pada pertanian , perkebunan dan hasil hutan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

### **5.3.2. Kebun**

Bentuk penggunaan lahan dalam bentuk kebun adalah model pengelolaan tanaman pertanian yang terdiri dari tanaman tahunan antara lain tanaman kopi, merica, dan cengkeh. Adapun tanaman semusim berupa bawang merah, jagung, tomat, dan ubi. Luas lahan kebun dari 68 responden yang di

jadikan perkebunan rata-rata 0,5 - 2 Ha dan ada satu orang responden yang memiliki kebun dengan luas sampai 4 Ha.

### **5.3.3. Status Kepemilikan Lahan**

Masyarakat di Desa Latimojong pada umumnya adalah masyarakat lokal asli yang tinggal sejak lahir adapun warga pendatang merupakan warga darah lain yang menikah dengan penduduk asli Desa Latimojong. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota Aliansi Masyarakat Adat Massenrempulu (AMAN) Pak Wiwin

“Masyarakat yang ada di sekitar Kawasan Hutan Lindung adalah suku Duri dan kesehariannya menggunakan bahasa Duri Enrekang. Mereka tinggal di sekitar hutan dan mengelola kebun secara turun temurun. Namun masyarakat yang ada disana sudah tidak menganut system kepala suku”

(Wawancara 15 Agustus 2018)

Berdasarkan lahan yang mereka miliki berasal dari warisan keluarga baik di luar kawasan maupun didalam kawasan hutan lindung. Adapun juga beberapa warga yang membuka lahan di dalam kawasan hutan lindung di Desa Latimojong.

Berdasarkan lahan yang mereka miliki hanya beberapa orang yang memiliki surat-surat bukti penguasaan lahan berupa PBB. Responden yang memiliki surat bukti kepemilikan lahan (PBB/akte jual beli tanah) adalah sebanyak 13 orang dan responden yang tidak memiliki surat kepemilikan lahan sebanyak 55 responden. Responden yang memiliki bukti kepemilikan lahan dikarenakan bahwa lahan yang mereka miliki berasal dari warisan nenek moyang mereka atau dari keluarga secara turun temurun. Dan responden yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan mengatakan bahwa mereka tidak sempat untuk mengurus tanah mereka dikarenakan kesibukan dan biaya yang relatif mahal.

Menurut Responden Hamsa (48 Tahun) dia menyebutkan

“ susah sekali kalo mau urus sertifikat tanah baruku lagi turun ke kota, mahal sekali mau di bayar, belum lagi kebutuhan hidup, itu orang yang ada surat tanahnya yang punya jg uang banyak, kebanyakan orang disini tidak memiliki surat tanag karna biayanya na pikir”

(Wawancara, 2 juli 2018)

Ini menandakan bahwa mereka yang tidak memiliki surat tanah dikarenakan permasalahan biaya yang tinggi dan jarak yang jauh dari kota. Meskipun demikian sejauh ini konflik antar masyarakat akibat perebutan lahan belum pernah terjadi dikarenakan mereka masih saling percaya bahwa lahan yang mereka miliki harus di pergunakan sebaik baiknya karna merupakan sumber kebutuhan sehari hari.

Menurut wawancara dengan Responden Nene Ijja (70 Tahun) mengatakan

“ Eda bangga to sibobo gara gara tanah sa pada nurusu bangri barahna tau, biasa de to manglolon barabah tapi sipangkada rampa rampa ri”  
( *tidak pernah ada orang berkelahi disini gara gara tanah karna mereka mengolah tanahnya sendiri biasa ada orang yang menambah kebunnya namun mereka menyelesaikannya dengan baik baik*)”

Wawancara, 9 agustus 2018

#### **5.4. Pemahaman Masyarakat Tentang Hutan Lindung**

Sebagian masyarakat Desa Latimojong tidak mengetahui adanya Hutan lindung pegunungan latimojong. Hutan menurut pengetahuan masyarakat merupakan tempat dimana mereka menggantungkan hidup. Namun mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa hutan itu penting untuk kehidupan dan harus dijaga kelestariannya.

Namun sejauh ini pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana kelmbagaan pengelolaan hutan lindung itu sendiri kurang bahkan tidak

diketahui oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan sosialisasi belum pernah dilakukan di Desa Latimojong yang berbatasan langsung dengan hutan lindung pegunungan latimojong. Sosialisasi yang kurang mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai hutan lindung dan mengenai keterlibatan mereka dalam melestarikan dan menjaga khususnya Hutan lindung pegunungan latimojong.

Kepala Desa Latimojong syahrudin (54 Tahun) mengatakan bahwa

“ Sampai saat ini tidak pernah ada sosialisasi mengenai Hutan lindung maknaya kebanyakan masyarakat disini tidak tau mengenai hutan lindung dan dimana batas batas bantasnya, biasa ada petugas mau datang tapi saya bilang jangan langsung menegur karna pasti masyarakat akan marah”

(Wawancara 10 juli 2018)

Ini memperkuat landasan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak sampai ke level bawah. Sehingga dalam pelaksanaan penjagaan dilapangan sangat sulit karena masyarakat tidak memahami aturan aturan yang ada.

Apabila kita memandang hutan secara keseluruhan, maka fungsi yang terpenting adalah dalam kaitannya dengan pengaturan tata air, yaitu menahan curah hujan yang tinggi dan kemudian menyerapnya ke dalam tanah. Fungsi penting ini sangat menunjang kegiatan penduduk di luar sektor kehutanan seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan permukiman.

Kelestarian hutan sangat bergantung pada peran serta warga sekitar hutan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Perilaku yang peduli terhadap kelestarian hutan dapat dilakukan dengan tidak melakukan penebangan pohon di hutan, tidak melakukan pembukaan areal kebun di dalam hutan dan turut mengawasi perilaku warga lain yang menebang pohon di hutan.

## **5.5. Bentuk Potensi Konflik yang Berkembang**

Masyarakat Yang tinggal bermukim dan beraktifitas dalam kawasan hutan menghawatirkan lahan mereka kemungkinan termaksud dalam kawasan Hutan Lindung. Masalah besar yang kemudian timbul jika lahan yang mereka tempati termaksud dalam kawasan Hutan Lindung.

Bentuk potensi konflik yang ada di Desa Latimojong adalah sebagai berikut

1. Masyarakat yang tinggal bermukim dan berladang dalam kawasan Hutan Lindung Pegunungan Latimojong mereka mengelolah lahan warisan nenek moyang mereka atau keluarga mereka dan adapula yang membuka lahan demi meningkatkan ekonomi.
2. Masyarakat bermukim di luar kawasan hutan tetapi memiliki lahan berupa tanaman kopi, merica, cengkeh, dll dalam kawasan Hutan Lindung.
3. Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung cenderung merusak kawasan karena mereka menebang pohon untuk membuka lahan dijadikan kebun dan kebutuhan kayu baik untuk bangunan rumah mereka maupun dijadikan kayu bakar.
4. Terbitanya surat surat tanah dalam kawasan hutan lindung bisa memicu jula beli tanah dalam kawasan hutan lindung
5. Tidak adanya patok atau batas disekitaran kawasan hutan lindung memicu masyarakat membuka lahan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, masalah masyarakat rasakan adalah kurangnya pengetahuan apa yang dimaksud dengan hutan lindung itu

sendiri, Masalah tersebut hanya sebatas keluhan, kekhawatiran dari masyarakat dan sebelum menjadi konflik yang besar. Dalam diskusi yang dilakukan dengan masyarakat, mereka mengakui adanya kekhawatiran lahan mereka yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung tanahnya tidak bisa lagi dimiliki oleh masyarakat, dan menimbulkan adanya peraturan-peraturan baru yang mengikat mereka.

Masalah lain yang timbul dan dikhawatirkan akan berpotensi konflik adalah masalah batas kawasan hutan. Masyarakat tidak mengetahui adanya batas kawasan hutan lindung karena selama ini penetapan batas kawasan berupa patok pal beton dan pal seng tidak pernah ada sehingga masyarakat hanya membuka lahan dan tidak mengetahui apakah lahan tersebut masuk kawasan hutan atau tidak. Hal ini bisa menjadi pemicu konflik antara pihak kehutanan jika nantinya ada pemasangan patok pada batas kawasan hutan yang berada tepat di kebun masyarakat yang telah diklaim sebagai miliknya.

Menurut responden Yunus (55 Tahun).

“kami tidak pernah melihat adanya pemasangan patok batas kawasan hutan lindung, yang saya tau bahwa disini sudah ditetapkan sebagai hutan lindung, jika pun ada maka seharusnya pemerintah mengadakan diskusi dulu dengan masyarakat”

(Wawancara 28 Agustus 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui Masyarakat menginginkan jika sewaktu-waktu ada penetapan batas kawasan hutan pemerintah sebaiknya mengadakan sosialisasi terlebih dahulu atau pembicaraan yang lebih intensif dengan warga dan mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka.

Bentuk-bentuk konflik yang berkembang di masyarakat dapat dilihat pada Tabel matrix 12. berikut ini

Tabel.12 Bentuk Potensi Konflik Yang Berkembang di Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Dampak		Harapan dan Keinginan		Solusi	
		Hutan Lindung	Masyarakat	Hutan Lindung	Masyarakat		
1	<b>Bentuk Potensi Konflik</b>	Masyarakat Berkebun dalam Kawasan Hutan Lindung	Terjadi Peruntukan lahan dari hutan lindung menjadi perkebunan	Banyaknya lahan yang kosong menarik perhatian masyarakat untuk di manfaatkan	Masyarakat tidak masuk dalam kawasan untuk membuka lahan karna semakin lama lahan merak semakin luas	Areal yang kosong bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan masyarakat setempat	Masyarakat sekiranya tidak melakukan perambahan memperluas lahan yang sudah di garap karna bisa merusak fungsi hutan
2		Masyarakat mengambil kayu dalam Kawasan Hutan Lindung	Kayu akan habis jika masyarakat terus menerus menebang pohon sehingga kawasan akan gundul dan bisa menyebabkan erosi	Kebutuhan kayu untuk bahan bangunan rumah mereka	Masyarakat tidak mencuri kayu dalam kawasan hutan lindung	Sebaiknya masyarakat mengambil kayu seperlunya saja, tanpa menebang pohon	Untuk pemanfaatan kayu yang mati sepanjang masyarakat tidak melakukan penebangan kayu untuk keperluan komersil
3		Masyarakat membuat surat PBB (Pajak Bumi Bangunan) lahan yang menurut mereka warisan nenek moyangnya	Terjadi perluasan lahan yang terus menerus di kawasan hutan	Lahan masyarakat yang ilegal semakin bertambah	Masyarakat tidak membuat surat PBB kawasan hutan lindung karna itu merupakan pembodohan pemerintah setempat	Lahan mereka garap sebaiknya di tanami kayu	Masyarakat yang sudah membuat surat PBB (Pajak Bumi Bangunan) sebaiknya tidak menjual lahan tersebut
4		Terbitnya sertifikat tanah dalam kawasan Hutan Lindung	Terjadinya isu jual beli lahan dalam kawasan hutan lindung	Masyarakat semakin merambah kawasan hutan			Mendorong pemerintah melakukan pemebntukan perhutanan sosial



## **VI. PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk-bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat Desa Latimojong disekitaran kawasan Hutan Lindung berupa kebun dan sawah.
2. Bentuk-Bentuk potensi konflik yang daapat berkembang di masyarakat yaitu
  - a. Masyarakat yang melakukan aktifitas pemanfatan lahan dalam Kawasan Hutan Lindung Mempengaruhi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan.
  - b. Jarangnya Masayrakat yang memiliki bukti kepemilikan lahan bisa memicu sengketa lahan di masyarakat.
  - c. Tidak adanya patok berupa seng palat memicu masyarakat selalu merambah Kawasan Hutan lindung.
  - d. Masyarakat cenderung merusak kawasan hutan lindung karena mereka menebang pohon untuk membuka lahan.

### **6.2. Saran**

1. Mendorong pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pembentukan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) HKM, atau melakukan perhutanan Desa sebagai resolusi konflik di dalam kawasan hutan lindung

2. Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan terhadap hutan lindung agar masyarakat tidak merambah hutan dengan terus menerus. Pemerintah juga melakukan diskusi dengan masyarakat terkait adanya isu isu ilegal logging.
3. Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam melakukan pelestarian dan penghijauan hutan kembali (reboisasi). Tanpa peran serta dan dukungan masyarakat maka kelestarian hutan juga tidak dapat dikendalikan.
4. Kelestarian hutan sangat bergantung pada peran serta warga sekitar hutan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Perilaku yang peduli terhadap kelestarian hutan dapat dilakukan dengan tidak melakukan penebangan pohon di hutan, tidak melakukan pembukaan areal kebun di dalam hutan dan turut mengawasi perilaku warga lain yang menebang pohon di hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admawidjaja, R. 1991. *Sistem Pengusahaan Hutan Konservasi Makalah pada Seminar Pengurusan Hutan Alam Indonesia pada Masa Mendatang dalam Rangka Hari Pulang Kampung Alumni (HAPKA) VIII*. 7 September 1991. Bogor
- Ardiansyah, W. 2002. *Studi Konflik Sosial Antara Masyarakat Sekitar Hutan dengan Pemegang HPH (Studi kasus di HPH PT. Rotan Timber, Desa Manalak Tebag, Kalimantan Timur)*. Bogor: [skripsi]. IPB.
- Arief, 2001. *Hutan dan Perhutanan*. Kansius, Yogyakarta.
- Betran dalam Wisadirana. 2004. *Sosiologi Pedesaan*. Malang. UMM Press.
- Departemen Kehutanan, 1999. *Hutan dan pengelolaan Hutan*. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Deur dkk (1979) dalam Simon (1993) *Hutan dan Pengelolahannya*. Balai Penelitian Kehutanan. Ujung Pandang
- Fauzi, Hamdani. 2012. *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Karya Putra Darwati. Bandung.
- Golar, 2014. *Resolusi Konflik dan Pemberdayaan Komunitas Peladang di TNL*. Prosiding Seminar Nasional Reaktualisasi Pengelolaan Hutan berbasis masyarakat. Makasar.
- Harihanto. 2001. *Persepsi, Sikap, dan Perilaku Masyarakat terhadap Air Sungai: Kasus Program Kali Bersih di Kaligareng, Jawa Tengah* [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Junianto, B.2007. *Persepsi, Sikap dan Perilaku Masyarakat Sekitar Terhadap Keberadaan Hutan Penelitian Haurbentes (Studi kasus di Desa Jugalaya, RPH Jasinga, BKPH Jasinga)*. [skripsi]. Bogor : IPB.

- Manan, S. 1998. *Hutan Rimbawan dan Masyarakat*. Bogor: IPB Press
- Mangandar. 2002. *Keterkaitan Sosial Masyarakat di Sekitar Hutan dengan Kebakaran Hutan (Studi kasus di Propinsi DT I Riau)*. [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana. IPB. Tidak dipublikasikan
- Master Plan Kehutanan (1975) dalam Manan, (1976) Diklat Kuliah. Lembaga Kerjasama Fakultas Kehutanan, Institute Pertanian Bogor, Bogor.
- Nugraha, dan Natujo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Wana Aksara. Banten.
- Ruch,(1967) *psychology and life, 7 edt. Scott*. Atlanta. Foresman and company
- Ramlan.2013. *Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan Hutan Tanaman Di Desa Tonusu Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah*. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako
- Siramba, J. 2014. *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Desa Leboni Pada Wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Kabupaten Poso*. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako.
- Suhendang, Endang, 2002. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Pt Dunia Pustaka: Jakarta.soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

**A. Identitas Responden**

1. Nama Responden : .....
2. Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
3. Pendidikan : .....
4. Alamat : .....
5. Jumlah Anggota Keluarga : .....
6. Jumlah Tanggungan Keluarga : .....
7. Pekerjaan
  - a. Pokok : .....
  - b. Sampingan : .....
8. Bentuk Usaha Tani : .....
9. Pendapatan Per Bulan

Keterangan : Pendapatan (Rp) responden

- a. < Rp. 500.000
- b. Rp. 500.000-Rp. 1.000.00
- c. >Rp. 1.000.000

**B. Pengetahuann**

1. Apa yang anda ketahui tentang hutan lindung ?
2. Jika hutan rusak apa ada kerugian yang anda rasakan?
3. Jika ada,apa saja kerugiannya?
4. Apa fungsi hutan yang anda ketahui?

**C. Sejarah Kepemilikan dan Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat**

1. Berapa luas lahan yang anda miliki
  - Di Dalam Kawasan Hutan

Jawab.....  
.....

- Di Luar Kawasan Hutan

Jawab.....  
.....

2. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Karangany?

Jawab.....  
.....

3. Bagaimana sejarah kepemilikan lahan yang anda miliki?

Jawab.....  
.....

4. Apakah lahan yang anda miliki sekarang memiliki status kepemilikan yang legal?

Jawab.....  
.....

5. Jika status lahan yang di akui, apa bukti kepemilikan lahan yang anda miliki?

Jawab.....  
.....

6. Jika tidak ada Bukti kepemilikan lahan yang anda miliki bagaimana anda mempeertahankan klaim yang anda miliki tersebut?

Jawab.....  
.....

**D. Potensi Konflik Sumber konflik serta permasalahan mayarakat**

1. Adakah masalah yang anda rasakan dalam sistem pengelolaan hutan di lingkungan anda?

Jawab.....  
.....

2. Apakah yang menjadi permasalahan utama menurut anda?

Jawab.....  
.....

3. Apakah masalah tersebut hanya sebatas isu yang berkembang kemudian berbentuk konflik?

Jawab.....  
.....

4. Jika ada bagaimana awal munculnya konflik tersebut?

Jawab.....  
.....

5. Menurut anda bagaimana bentuk penyelesaian yang baik dari masalah tersebut?

Jawab.....  
.....

**E. Masalah Batas Kawasan Hutan**

1. Apakah anda mengetahui batas kawasan hutan negara di Desa ini?

Jawab.....  
.....

2. Apakah anda mengetahui tanda tanda batas kawasan hutan?

Jawab.....  
.....

3. Bagaimana tanda batas kawasan hutan tersebut

Jawab.....  
.....

4. Siapa yang memberitahu kalo itu batas kawasan hutan

Jawab.....  
.....

5. Pada saat penetaapn batas kawasan hutan apakah anda terlibat juga

Jawab.....  
.....

6. Apakah anda setuju dengan batas kawasan hutan yang ada selama ini?

Jawab.....  
.....

7. Jika anda tidak setuju sebaiknya batas kawasan hutann ini di letakkan dimana

Jawab.....  
.....

8. Apakah dalam penetapan batasan kawasan hutan ada masalah yang muncul antara pemerintah dengan masyarakat sekitar

Jawab.....  
.....

9. Bagaimana penetapan batas kawasan hutan yang anda inginkan

Jawab.....  
.....

**F. Tentang Kawasan hutan liindung Pegunungan latimojong**

1 Apakah anda tahu bahwa kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung pegunungan latimojong?

Jawab.....  
.....

2. Bagaimana anda mengetahui hal tersebut

Jawab.....  
.....

3. Apakah anda setuju dengan adanya kawasan hutan lindung pegunungan latimojong?

Jawab.....  
.....

4. Adakah keluhan masyarakat mengenai kawasan hutan lindung

Jawab.....  
.....

5. Apa harapan anda tentang pengelolaan di sekitaran kawasan hutan lindung

Jawab.....  
.....

Lampiran 2. Foto Foto Kegiatan Penelitian



Gambar 3. Wawancara pada Responden





Gambar 4. Lahan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Hutan Lindung



Gambar 5. Perambahan Hutan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat



Gambar 6. Kayu yang di Tebang Oleh Masyarakat

Lampiran 3. Data Responden

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjan Utama	Pekerjaan Smappingan	Jenis tanaman	Luas Lahan Garapan (ha)	Jumlah Tanggungan	Pendapatan/bulan
1	suhar diknas	29	sma	supir	tani	kopi,Cengkeh	0,60 ha	2	C
2	Papa Pani	38	sd	Tani	pencari getah damar	kopi	0,85	4	B
3	papa roni	57	tidak sekolah	Tani	penyadap	kopi	0,40 HA	3	A
4	papa linda	47	tidak sekolah	Tani	pencari getah damar	kopi	1	6	B
5	sulhair	29	smp	Tani	pencari getah damar	kopi	0,32	3	A
6	juha	34	tidak sekolah	Tani	pencari rotan	kopi	0,75 a	5	A
7	Lodang	55	tidak sekolah	Tani	pencari rotan	kopi	1 ha	5	A
8	tajuddin	38	D3	supir	Tani	kopi	0,50 ha	4	B
9	irsal	34	smp	Tani	sawah	kopi	0, 25 ha	2	A
10	junaidi	48	smp	Tani	penyadap, rotan	kopi	1 HA	5	C
11	arham	31	sma	Tani	ojek	kopi	0,85	2	B
12	momo	49	tidak sekolah	Tani	nghuma	kopi	0,7	3	A
13	sahrul	29	sd	Tani	sawah	Cengkeh	1 ha	2	A
14	suharman	30	sd	Tani	pencari rotan	kopi	1 ha	2	A
15	dulla	38	tidak sekolah	Tani	pengrajin	kopi	0,95	4	A
16	anca	30	SD	Tani	pengerajin	kopi	0,64 ha	3	B
17	damming	27	sma	dagang	tani	kopi,Cengkeh	2,5 ha	1	C
18	kacong	39	smp	Tani	pencari rotan	kopi	1,5 ha	4	B
19	babak	53	tidak sekolah	Tani	ternak	kopi	0,75	3	A
20	sampe	41	SD	Tani	sawah	kopi	1 ha	2	A
21	ojok	36	smp	Tani	sawah	kopi	0,70 ha	1	A
22	yunus	55	tidak sekolah	Tani	penyadap	kopi	1,85 ha	2	B
23	muttar	32	sma	Buruh tani	tani	kopi	0,65 ha	3	A

24	muhlis	39	SD	Tani	sawah	kopi	2 ha	2	B
25	kiman	41	SD	Tani	sawah	kopi	0,65 ha	4	A
26	supar	45	tidak sekolah	Tani	ternak	kopi	1 ha	4	A
27	ambek jumriana	69	tidak sekolah	dagang	tani	kopi,Cengkeh	1 ha	5	C
28	julun	31	smp	Tani	ternak	kopi	0,70 ha	2	A
29	karim	47	tidak sekolah	Tani	ternak	kopi	1 ha	2	A
30	donding	45	tidak sekolah	Tani	pencari rotan	kopi	1,80 ha	3	B
31	cibin	29	tidak sekolah	Tani	pencari getah damar	kopi	0,50 ha	2	A
32	suman	48	tidak sekolah	warung	tani	kopi	0,75	3	C
33	ali	34	smk	dagang	tani	kopi,bawang,merica	1 ha	1	C
34	emmang	36	sd	Buruh tani	tani	kopi	0,50 ha	0	A
35	madda	31	sma	Tani	sawah	cengkeh	0,85	0	A
36	munnadi	38	sma	Tani	ojek	kopi	1 ha	2	A
37	salim	42	SD	Tani	nghuma	kopi	1,8 ha	4	A
38	hamdan	38	tidak sekolah	Tani	ternak	kopi	0,70 ha	1	A
39	nene ijja	70	tidak sekolah	warung	tani	kopi, cengkeh, bawang	2 ha	5	C
40	haling	51	tidak sekolah	Buruh tani	tani	kopi	0,60 ha	3	A
41	bahar	53	tidak sekolah	Tani	sawah	kopi	0,80 ha	2	A
42	papa mardiana	46	tidak sekolah	dagang	tani	kopi	0,75 ha	2	C
43	saleh	45	S1	PNS	sawah	kopi,sawah,cengkeh	4 ha	5	C
44	hamsa	48	SD	Tani	ternak	cengkeh	0,50 ha	3	A
45	rahiman	55	tidak sekolah	Tani	ternak	sawah	0,40	3	A
46	andri	34	sd	Buruh tani	sawah	kopi	1 ha	1	B
47	habibi	32	sd	Tani	sawah	kopi	0,80 ha	1	A
48	saiful	46	smp	Tani	sawah	coklat	1 ha	2	B
49	ardi	31	sma	supir	Tani	coklat	0,70 ha	2	C
50	ari	36	tidak sekolah	Tani	sawah	Kopi, Merica	0,75 ha	2	A

51	sakkir	28	tidak sekolah	Buruh tani	Tani	kopi	1 ha	1	B
52	ilyas	37	tidak sekolah	Tani	pencari rotan	cengkeh	1,8 ha	5	A
53	daruk	49	sd	Tani	sawah	cengkeh	1 ha	4	A
54	mirais	38	tidak sekolah	Tani	sawah	cengkeh	0,50 ha	4	A
55	ladi	48	sd	Tani	sawah	cengkeh, kopi	1,5 ha	6	B
56	culan	40	sd	Tani	sawah	cengkeh	0,75 ha	2	A
57	akkan	27	sma	Tani	ternak	kopi,bawang,	1 ha	3	B
58	naing	43	tidak sekolah	Tani	sawah	kopi	1 ha	2	B
59	jaya	45	tidak sekolah	Buruh tani	tani	kopi	0,40 ha	3	A
60	curu	50	tidak sekolah	Tani	sawah	kopi	1,75 ha	3	B
61	lahasi	45	sd	Buruh tani	tani	kopi	1 ha	3	B
62	hari	53	sd	Tani	sawah	kopi	0,70 ha	5	A
63	arman	38	sd	Tani	sawah	kopi	0,50 ha	4	A
64	idgham	29	tidak sekolah	Buruh tani	sawah	kopi	1,30 ha	2	B
65	munaing	50	S1	PNS	tani	kopi,bawang,merica	2,60 ha	6	C
66	hattasa	40	tidak sekolah	Tani	sawah	kopi,bawang	0,40 ha	3	A
67	muhlis	42	tidak sekolah	Buruh tani	tani	kopi	1 ha	3	B
68	wawan	28	smp	Tani	sawah	kopi	0,50 ha	0	A

Keterangan : Pendapatan (Rp) responden

a. < Rp. 500.000

c. >Rp. 1.000.000

b. Rp. 500.000-Rp. 1.000.00

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Ibrahim Masdin, disapa dengan Ibe'. Lahir pada tanggal 15 Mei 1994 di kelurahan Kalimbua, Anak Kedua Dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Suami istri Masdin, S,Pd dan Suhati. Penulis menempuh pendidikan dari bangku TK Aba Kalimbua kemudian melanjutkan ketingkat SD Negeri 134

Kalimbua Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.. Setelah Tamat SD penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Baraka. Kemudian setelah tamat SMP penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Baraka. Setelah di nyatakan lulus, penulis langsung melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Angkatan 2013. Penulis sangat bersyukur telah di berikan kesempatan menimba ilmu sebagai bekal di masa yang akan datang. Penulis berharap dengan ilmu yang didapatkan dapat diamalkan dengan baik di dunia dan di akhirat kelak. Serta dapat membantu keluarga, teman-teman, juga masyarakat dan terutama untuk ibu yang selalu memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya. dan Bapak,yang selalu bersabar dan berdoa untuk penulis. Sembah sujud penulis bagi ibunda dan Do,a ku untuk ayahanda tak terputus. Atas semua do,a, dorongan semangat, serta bantuan moril maupun materialnya selama penulis menjalankan program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.